



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AUDIT OPERASIONAL OLEH *INTERNAL CONTROL*
TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PADA
BPRS CARANA KIAT ANDALAS**



OLEH

NAMA : WIKI ARCHA DIWA

NIM : 181000262201003

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2020

PERSETUJUAN SKRIPSI

Telah disetujui untuk ujian skripsi dan koprehensif

Tanggal 8 Maret 2021

Implementasi Audit operasional oleh Internal Control terhadap bagian administrasi pembiayaan pada BPRS Carana kiat Andalas

Nama : Wiki Archadiwa

NIM : 18100 Nama : Wiki Archadiwa


Program Studi : Akuntansi NIM : 181000262201003

Program studi : Akuntansi

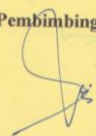
Padang, 08 Maret 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing I


Fitri Yulianis, SE. M.Si

Pembimbing II


Rina Widyanti, SE. M.Si

Diketahui
Ketua prodi


Immu Puteri Sari, SE. M.Si

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan tim penguji skripsi

Tanggal 8 maret 2021

Judul : Implementasi Audit operasional oleh *internal control* terhadap bagian administrasi pembiayaan pada BPRS Carana kiat Andalas

Nama : Wiki archadiwa

NIM : 181000262201003

Program Studi : Akuntansi

TIM PENGUJI

Ketua : Fitri Yulianis, SE. M.Si

Penguji: Puguh Setiawan, SE. M.Si

Immu Puteri Sari, SE. M.Si

Rina Widyanti, SE. M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

DISETUJUI OLEH

Pembimbing I

Pembimbing II

(.....)
Fitri Yulianis, SE. M.Si

(.....)
Rina Widyanti, SE. M.Si

DIKETAHUI OLEH:

Dekan
Fakultas Ekonomi

Dr. Tri Irfi Indrayani, M.Pd

ketua
Prodi Akuntansi
(.....)
Immu Puteri Sari, SE. M.Si

HAK CIPTA

Hak cipta ini milik Wiki Archadiwa tahun 2021, dilindungi oleh Undang-Undang yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, foto copy, micro film, dan lain-lainya.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain.

Kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 21 April 2021
Yang menyatakan



Wiki archadiwa
181000262201003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Azza wa jalla yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, berkah petunjuk dan kemudahan dari Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala untuk baginda Rasulullah Sholallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini berjudul **Implementasi Audit operasional oleh *internal control* terhadap bagian administrasi pembiayaan pada BPRS Carana kiat Andalas**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



Dalam proses pembuatan Skripsi ini hingga selesai penulis menyadari dapat menyelesaikannya berkat dukungan, bimbingan dan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Dalam hal kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

4. Ibu Fitri Yulianis, SE. M.Si, sebagai pembimbing I dan ibu Rina Widyanti, SE. M.Si sebagai pembimbing II dalam penyusunan Skripsi dari awal hingga dapat diselesaikan.
5. Pegawai pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh hingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan sejurusan Akuntansi yang juga berperan penting dalam perkuliahan, baik dalam kuliah maupun dalam penyusunan Skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan secara tulus.

Penulis telah menyelesaikan Skripsi dengan segenap kemampuan. Setiap kendala dan hambatan yang penulis dapatkan selama penulisan Skripsi merupakan suatu pembelajaran yang bernilai untuk kedepannya. Dalam kesempatan ini penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terakhir penulis mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan Skripsi ini.

Padang, 21 April 2021

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “**Implementasi Audit operasional oleh *internal control* terhadap bagian administrasi pembiayaan pada BPRS Carana kiat Andalas**” ditulis oleh **Wiki Archadiwa** dengan **NIM 181000262201003**, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera barat. Latar belakang permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah mengenai bagaimana implementasi Audit operasional yang dijalankan oleh *Internal control* terhadap proses dan administrasi pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas. Alasan penulis tertarik untuk membahas tentang audit operasional karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan audit operasional dan mengetahui implementasinya terhadap administrasi pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas terkait, dimana dalam penelitian ini merujuk pada aturan Bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan, dan fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang disusun pada satuan kerja audit intern.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisa informasi secara tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data adalah penulis langsung wawancara dengan bagian Auditor BPRS Carana Kiat Andalas dan studi pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi dari audit operasional yang dijalankan oleh *Internal Control* memperlihatkan kejelasan, transparansi, tanpa ada intrfensi dari pihak lain, dan bersifat Independen

Kata kunci: Audit operasional, BPRS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN HAK CIPTA

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.4 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Audit.....	7
2.1.2 Data dan fakta	8
2.1.3 Jenis-jenis audit.....	10
2.1.4 Jenis-jenis Auditor	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Audit Operasional	Error! Bookmark not defined.
2.1.5.1 Pengertian Audit Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5.2 Tujuan Audit Operasional	Error! Bookmark not defined.

2.1.5.3	Unsur-unsur audit operasional.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5.4	Standar pelaksanaan audit operasional.....	18
2.1.5.5	Rangkaian Audit.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5.6	Tahap-Tahap Audit Operasional ..	Error! Bookmark not defined.
2.1.6	Pengertian Internal control.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7	Manajemen Resiko Operasional	Error! Bookmark not defined.
2.1.7.1	Pengertian Resiko.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7.2	Tujuan Manajemen risiko.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7.3	Penyebab risiko	Error! Bookmark not defined.
2.1.8	Administrasi pembiayaan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5	Penelitian terdahulu	Error! Bookmark not defined.
1.6	Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		18
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	53
3.2	Jenis Penelitian	53
3.3	Metode Pengumpulan Data	54
3.4	Jenis Data	39
3.5	Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran umum PT. BPRS Carana Kiat Andalas	57
4.1.1	sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas.....	57

4.1.3	Struktur organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas.....	60
4.1.4	<i>Job Description</i> PT. BPRS Carana Kiat Andalas	62
4.1.5	Produk dan layanan PT. BPRS Carana Kiat Andalas	68
4.2	Prosedur Pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas	70
4.2.1	Wilayah ekspansi Pembiayaan.....	70
4.2.2	Persyaratan administrasi Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas.....	71
4.2.3	Proses usulan <i>Account Officer</i> (AO).....	73
4.2.4	Analisa pembiayaan	74
4.4	Audit Operasional Pembiayaan.....	75
4.4.1	Audit bidang pembiayaan	75
4.4.2	Landasan ketentuan Audit operasional pembiayaan	76
4.4.3	Pendekatan dalam melakukan Audit Operasional Pembiayaan	77
4.5	Program Kerja <i>Internal Control</i> BPRS Carana Kiat Andalas.....	78
4.6	Prosedur dan tata cara audit operasional.....	80
4.7	pelaksanaan Audit Operasional oleh <i>Internal Control</i> terhadap pembiayaan di BPRS Carana kiat Andalas	84
4.7.1	Audit Syariah atas Pembiayaan.....	90
4.7	Pengendalian risiko terhadap administrasi pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas	92
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dalam dunia keuangan Bank memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan mikro dan makro. Sistem keuangan dan perbankan modern berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya. Sehingga persaingan antar Bank semakin maju seiring berjalannya waktu.

Menurut Abdurrachman (dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (Dobas, et al. (2007: 1) . Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank yang utama adalah sebagai intermediasi, yaitu lembaga yang membutuhkan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang

membutuhkan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank merupakan institusi yang selalu mengedepankan visi sebagai organisasi yang terpercaya.

Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi profit, bank harus mampu mengelola dana masyarakat yang dipercaya kepadanya.

Sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh profit, bank memperoleh sumber pendapatan utama melalui penyaluran pembiayaan. Semakin besar pembiayaan yang diberikan, diharapkan pendapatan yang diterima juga semakin banyak. Pada dasarnya pembiayaan yang baik adalah pembiayaan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana bank dalam menyalurkan dana harus memenuhi segala persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu memastikan dan juga meningkatkan kegiatan operasional bank berjalan dengan baik sekaligus perbaikan atas segala kekurangan, yang ditentukan dalam rangka menunjukkan efektifitas dan efisiensi usaha yang dilakukan. Untuk itu perlu adanya alat untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan yaitu Audit Operasional.

Audit Operasional merupakan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perbankan, baik terhadap bagian atau fungsi unit kerja maupun terhadap prosedur pekerjaan, guna evaluasi unit kerja baik rencana kerja, pencapaian tujuan organisasi, serta peningkatan manfaat atas semua sumber daya perusahaan. salah satu alat pengendalian manajemen untuk mengusahakan agar kegiatan operasional lebih efisien, hemat dan produktifitas. Selain itu

audit operasional bertujuan memberikan rekomendasi yang konstruktif dan terarah terhadap dalam pengelolaan aktivitasnya ke arah perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Pada BPRS Cerana Kiat Andalas, audit operasional dilakukan oleh fungsi *Internal Control*. Dalam struktur organisasi cabang internal control merupakan fungsi yang independen yang memiliki wewenang untuk melakukan audit operasional baik di kantor cabang utama maupun di kantor pusat. Fungsi ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan apakah telah terpenuhi segala standar dan prosedur yang telah ditetapkan, dalam hal ini khusus pada bagian administrasi pembiayaan, penyaluran dana kepada masyarakat atau pembiayaan merupakan satu alur rangkaian proses. Tahapan proses itu terdiri dari pengenalan nasabah, melengkapi data, melakukan analisis legal, dan analisis appraisal, selanjutnya pembiayaan dikomitekan pada Dewan Komite yang menyetujui atau menolak pembiayaan yang diajukan. Proses terakhir apabila pembiayaan disetujui adalah melakukan proses pencairan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dijelaskan bahwa audit operasional bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Audit operasional dilakukan satu kali dalam setahun. Sebelum melakukan pemeriksaan auditor internal menerima surat penugasan untuk penelitian pendahuluan dan memberikan surat pemberitahuan kepada unit kerja yang diperiksa. Novriani(2014 : 81).

Dalam menjalankan aktivitas perbankan tentunya dihadapkan pada berbagai risiko. Menurut Marelis (2019 : 5) risiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan, jenis resiko yang terdapat pada fungsi administrasi pembiayaan meliputi resiko yang timbul disebabkan kekeliruan dalam melakukan transaksi, kesalahan pengimputan nomor perkiraan, kesalahan dalam keabsahan dan kelengkapan transaksi. Resiko lain muncul pada fungsi ini adalah resiko reputasi bank. resiko reputasi bank adalah resiko yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam transaksi sehingga nominal pembiayaan yang dijanjikan kepada nasabah tidak sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan reputasi bank sebagai lembaga yang dipercaya tidak dapat terpenuhi. Resiko lain yang dapat terjadi adalah risiko kepatuhan, yaitu resiko yang terjadi apabila fungsi tidak penuh dalam membukukan dengan baik dan benar pengembalian pinjaman nasabah, terutama pengembalian pokok utang. Selain itu fungsi ini juga di tuntut untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar atas pendapatan yang di terima oleh bank yang berasal dari pembiayaan yang di berikan. Kemampuan seorang Auditor operasional dalam memahami setiap jenis transaksi sangat di butuhkan. Dengan banyaknya resiko pada fungsi administrasi pembiayaan maka sangat penting audit operasional dilakukan dengan tepat, sehingga resiko yang akan muncul dapat diminimalisir agar tidak berdampak buruk terhadap perusahaan. (Hadi, 2009). Pada pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas, Administrasi

pembiayaan memiliki tanggung jawab terhadap segala administrasi dan akuntansi pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan tersebut. Fungsi ini merupakan tahapan terakhir dari satu siklus proses pembiayaan. Dalam sudut audit operasional, proses dari pencairan sampai dengan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh fungsi administrasi pembiayaan (*supporting*) ini merupakan proses yang memiliki resiko yang paling tinggi.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Audit Operasional oleh *Internal Control* Terhadap Bagian Administrasi Pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas**”

1.2 Rumusan Masalah

2. Bagaimana pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan oleh fungsi *Internal Control* pada bagian Administrasi Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas?
3. Apa saja resiko yang timbul jika perusahaan gagal dalam mengendahkan resiko pada bagian Administrasi pembiayaan?
4. Bagaimana peranan *Internal Control* terhadap bagian Administrasi Pembiayaan dalam menjalankan audit operasional dapat membantu manajemen BPRS Carana Kiat Andalas dalam mengambil keputusan terhadap kinerja staf Administrasi Pembiayaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi *Internal Control* melakukan audit operasional terhadap bagian Administrasi Pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas.
- b. Untuk mengetahui resiko-resiko yang mungkin saja terjadi pada bagian Administrasi Pembiayaan.
- c. Bagaimana fungsi *Internal Control* dapat memberikan masukan kepada pihak manajemen BPRS Carana Kiat Andalas terhadap kinerja bagian Administrasi Pembiayaan.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memenuhi prasyarat studi pada jenjang strata satu (S1) program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- b. Sebagai rujukan dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang, terutama penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah.





2.1 Audit

Menurut Sukrisno Agoes Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Menurut Arens dan Loebbecke Auditing sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu

entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten.

Menurut Mulyadi Auditing (2010:9) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan

tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.

Menurut Whittington, O. Ray and Kurt Pann Audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas/perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independent. Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, bertanya baik di dalam maupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan memperoleh data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit.

Menurut Konrath, Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil laporannya kepada pihak berkepentingan.

Menurut Sawyer Audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor (orang yang melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC)

Audit adalah proses sistematis guna memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai pernyataan kejadian dan tindakan ekonomi dengan tujuan menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut PSAK – Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 Audit adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas asersi atau pernyataan tentang kegiatan ekonomi dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan yang terjadi.

Menurut William F. Meisser, Jr Audit merupakan aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang guna menambah nilai dan meningkatkan operasi entitas/organisasi/perusahaan. audit membantu suatu entitas mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen dan pengendalian maupun proses tata kelola.

Dalam berbagai pengertian tentang fungsi manajemen disebutkan bahwa pengendalian (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian terdiri atas pemeriksaan dan tindak lanjut, penjabatannya adalah pemeriksaan akan menghasilkan temuan yang memerlukan tindak lanjut (*perbaikan*). Apabila tindak lanjut dilaksanakan, maka seluruh kerangka kegiatan pemeriksaan dinamakan pengendalian. Sebaliknya, jika tindak lanjut tidak dilakukan, maka seluruh kegiatan pemeriksaan hanya bersifat pengawasan. Jadi, salah satu pendekatan dalam melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian adalah pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Audit.

Yang dimaksud dengan audit itu sendiri menurut Daen Naja (2007 : 6) adalah suatu proses penilaian dalam arti yang luas, secara

independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan mengenai opini dan saran perbaikan.

a. Data dan fakta

Data menurut Webster New World Dictionary adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diakui atau dianggap. Diketahui yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi).

Fakta menurut Daeh Naja (2007) adalah dasar dari suatu pemeriksaan yang dalam operasional perusahaan (perbankan) disebut dokumen. Jenis data dan fakta ini sangat bergantung oleh sifat pemeriksaan yang dilakukan. Data dan fakta yang diperiksa lebih banyak bergantung pada sifat ruang lingkup pemeriksaan, sifat/ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

- *Financial audit*, yaitu pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan dalam suatu periode tertentu guna memberikan perlindungan terhadap keamanan harta perusahaan.
- *Operational audit*, yaitu pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perbankan, baik terhadap bagian atau fungsi unit kerja maupun terhadap prosedur pekerjaan, guna evaluasi dan perbaikan rencana kerja, pencapaian tujuan organisasi, serta peningkatan

manfaat atas semua sumber daya perusahaan. Dalam audit operasional ada tiga hal yang menjadi tujuan:

1. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep input-proses-output.

Efisiensi adalah rasio output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat membantu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2. Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output. Sementara itu, menurut

Mardiasmo (2002:134), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

3. Ekonomisasi



Ekonomisasi berbicara tentang cara perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap kegiatan operasinya (Mardiasmo 2002:134). Artinya, apakah perusahaan mampu memperoleh sumber daya yang digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang paling kecil sehingga harga pokok per unit input yang digunakan dalam operasi juga menjadi rendah

- *Managerial audit* yaitu pemeriksaan terhadap keputusan, kebijaksanaan dan peraturan manajemen perusahaan dan mengevaluasi dampaknya, guna evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Jenis-jenis audit

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit ini

adalah untuk mencari tahu apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Audit ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang ada.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri ringkasan temuan atau pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan kriteria tersebut.

Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk mencari tahu apakah perusahaan/organisasi sudah menaati peraturan yang berlaku atau belum. Peraturan ini bisa menyangkut peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan/organisasi itu sendiri ataupun peraturan, ketetapan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Audit Operasional atau *Management Audit*

Audit operasional (*operational audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

Tujuan audit ini adalah untuk mencari tahu apakah kegiatan operasional yang dilakukan dalam sebuah perusahaan sudah berjalan dengan efisien dan efektif atau belum. Kegiatan operasional lain yang di audit oleh audit operasional ini adalah kebijakan akuntansi.

4. Audit pemeriksaan umum atau General Audit

Sama seperti namanya, audit pemeriksaan umum adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Audit Pusat atau KAP yang bersifat independent pada suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh sekaligus memberikan penilaian juga opini tentang kewajaran laporan keuangan.

5. Audit pemeriksaan khusus atau Special Audit

Lawan dari pemeriksaan umum, audit pemeriksanaan khusus hanya dilakukan sesuai permintaan dari perusahaan. Audit yang dilakukan pada pemeriksaan khusus ini juga terbatas tidak umum seperti yang dilakukan pada pemeriksaan

umum. Namun walaupun seperti itu, pengerjaan tetap dilakukan oleh Kantor Audit Pusat atau KAP.

6. Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi dilakukan oleh KAP atau Kantor Akuntan Pusat yang hanya dilakukan kepada perusahaan yang data akuntansinya diproses menggunakan System Elektronik Data Processing (EDP).

7. Audit Forensik

Tujuan dari diadakannya audit forensik adalah untuk mencegah kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi. Audit forensik biasanya juga melakukan investigasi kriminal, mencari tahu kerugian dari suatu bisnis dan mencari tahu indikasi kecurangan saat berbisnis atau karyawan.

8. Audit Investigasi

Audit ini biasa dilakukan jika disatu perusahaan terindikasi sebuah penyimpangan yang karenanya dapat merugikan keuangan pihak lain. Audit investigasi adalah audit yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengidentifikasi (*identify*), menguji (*examine*), dan juga mengenali (*reorganized*) fakta dan informasi untuk mencari pembuktian atas kejadian yang sebenarnya terjadi

9. Audit Lingkungan

Keputusan Menteri LH 42 tahun 1994 menerangkan bahwa audit lingkungan merupakan proses manajemen yang didalamnya menyangkut evaluasi secara tercatat, obyektif, dan sistematis tentang bagaimana sebuah kinerja manajemen perusahaan atau organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kendali manajemen dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan serta pemanfaatan peraturan UU pengelolaan lingkungan.

c. Jenis-jenis Auditor

Audit Yang Ditinjau Berdasarkan Auditor Audit yang ditinjau berdasarkan auditor atau kelompok pelaksana audit ini terbagi menjadi tiga macam.

a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah auditor yang bekerja untuk kantor/lembaga akuntan publik yang merupakan pihak ke-3 dimana status mereka berada di luar lembaga atau perusahaan yang mereka audit. Auditor eksternal bekerja secara obyektif dan bersifat independent.

b. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja untuk perusahaan dimana mereka bekerja. Mereka bertugas untuk

mengawasi asset atau *Saveguard of Asset* dan mengawasi aktifitas sehari-hari operasional perusahaan mereka.

c. Auditor Pajak

Di Indonesia, auditor pajak biasanya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP yang tugasnya adalah melakukan ketaatan wajib pajak sesuai undang-undang yang berlaku.

d. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang memiliki tugas untuk menilai kewajaran sebuah informasi laporan keuangan instansi pemerintahan terhadap pelaksanaan program dan juga penggunaan aset yang dimiliki pemerintah.

2.2 Audit Operasional

a. Pengertian Audit Operasional

Audit operasional merupakan audit dimana auditor akan melakukan penelaahan secara sistematis bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Umumnya pada saat selesainya audit operasional ini, auditor akan memberikan saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

Selain itu definisi operasional merupakan suatu pemeriksaan yang dimaksud sebagai penilaian terhadap cara pengelolaan suatu organisasi dan bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, pemeriksa ditekankan pada penilaian terhadap penggunaan barang tenaga, jasa dan sebagainya ditinjau dari sudut efisiensi dan kehematan.

Selain itu Moller dan Witt (1999: 21) berpendapat tentang audit operasional: *operational auditing is an independent review including all aspect of an organization, its business, financial control, and the supporting system. It involves a systematic review of an organization's activities, or a stipulated segment of them, in relation to specified objective.*

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa audit operasional merupakan tindakan pemeriksaan segala aspek dalam organisasi secara independen yaitu aspek bisnis, pengendalian keuangan dan sistem pendukung lainnya dimana aspek aspek tersebut mempengaruhi

aktifitas organisasi yang akan diperiksa secara sistematis berhubungan dengan objek-objek yang spesifik.

Kegiatan didalam audit operasional salah satunya adalah merancang dan melaksanakan prosedur – prosedur audit untuk menguji kegiatan yang akan membantu manajemen dalam menelaah secara sistematis.

b. Tujuan Audit Operasional

Kegiatan organisasi dalam audit operasional ada 3 tujuan utama melakukan audit tersebut, Mulyadi (1990 : 23) antara lain.

1. Menilai prestasi (kinerja) manajemen
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
3. Membuat rekomendasi untuk memperbaiki atau tindak lanjut

Menurut pakar auditing Mulyadi (2002, 10), Audit Operasional berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan bukan hanya terhadap kegiatan akuntansi saja. Untuk mencapai itu, Audit Operasional akan melaksanakan tugas-tugas sebagai:

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik tidaknya pengendalian administrasi serta mendorong penggunaan secara efektif dan biaya yang minimum.

2. Menentukan seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian
3. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen dipatuhi
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan perusahaan.

c. Unsur-unsur audit operasional

Menurut arens & loebbecke (1997; 270), terdapat 5 (lima) unsur-unsur dalam audit operasional, yaitu antara lain:

1. Lingkungan Audit / pengendalian

Yaitu, tindakan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis dan pemilik suatu entitas mengenai pengendalian dan arti pentingnya.

2. Penetapan resiko oleh manajemen

Yaitu, identifikasi dari analisis oleh manajemen atas resiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Sistem komunikasi dan sistem akuntansi

Yaitu, metode yang dipakai dalam mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi satu entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.

4. Aktifitas audit/pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan.

5. Pemantauan

Yaitu penilaian efektifitas rancangan operasi struktur audit secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

d. Standar pelaksanaan audit operasional

Standar pelaksanaan audit kinerja terdiri atas 4 pernyataan yang dengan syarat syarat dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang harus dipenuhi.

Pernyataan standar pelaksanaan pertama adalah:

“pekerjaan harus direncanakan secara memadai”

Dasar pemikiran standar pelaksanaan yang pertama ini adalah suatu kenyataan bahwa objek audit biasanya terdiri atas objek yang baru atau objek yang berulang.

Pernyataan standar pelaksanaan kedua adalah:

“Staf harus disupervisi dengan baik”

Dasar pemikiran standar pelaksanaan kedua ini adalah bahwa pelaksanaan audit kinerja membutuhkan waktu yang cukup lama,

melibatkan jumlah auditor cukup banyak dengan latar belakang yang multidisiplin, jadwal penyelesaian pekerjaan yang ketat, serta lokasi audit yang tersebar di beberapa tempat dan daerah.

Pernyataan standar pelaksanaan ketiga adalah:

“bukti yang cukup, kompeten, dan releva harus diperoleh untuk menjadi dasar memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa”

Dasar pemikiran standar pelaksanaan ketiga ini adalah dalam pelaksanaan audit pada hakikatnya merupakan pengumpulan dan pengujian atas bukti dan fakta yang ada di lapangan sehingga bukti yang didapatkan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pernyataan standar pelaksanaan keempat adalah:

“pemeriksaan harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.

Dasar pemikiran standar pelaksanaan keempat ini adalah bahwa tujuan akhir audit kinerja adalah membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap pengelolaan entitas yang diaudit. Simpulan dan rekomendasi audit tersebut akan membawa dampak yang sangat luas bagi entitas dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang diaudit.

Hal-hal yang harus dilakukan auditor dalam merencanakan audit kinerja dirinci sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan signifikansi masalah dan kebutuhan potensial pengguna laporan audit
- b. Memperoleh suatu pemahaman mengenai program yang diaudit.
- c. Mempertimbangkan pengendalian internal.
- d. Merancang audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan kecurangan (*fraud*), dan ketidakpatutan (*abuse*)
- e. Mengidentifikasi kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diaudit
- f. Mengidentifikasi temuan audit dan rekomendasi yang signifikan dari audit terdahulu dan mempengaruhi tujuan audit.
- g. Mempertimbangkan apakah pekerjaan auditor lain atau ahli dapat digunakan untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan.
- h. Menyediakan pegawai atau staf yang cukup dan sumber daya lain untuk melaksanakan audit.
- i. Mengomunikasikan informasi mengenai tujuan audit serta informasi umum lain yang berkaitan dengan rencana dan

pelaksanaan audit kepada manajemen dan pihak lain yang terkait.

- j. Mempersiapkan rencana audit tertulis.

e. Rangkaian Audit

1. Meminta Dokumen yang Dibutuhkan

Setelah mengonfirmasi bahwa Auditor akan mendatangi klien yang akan diaudit, Auditor akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan Audit. Bahkan biasanya Auditor sudah mengirimkan daftar dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kepada klien di dalam Audit Checklist. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup salinan Laporan Audit sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Selain itu, Auditor juga dapat meminta bagan organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan dan komite terkait.

2. Mempersiapkan Rencana Audit

Auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana Proses Audit akan dilakukan. Setiap Auditor pastinya memiliki gaya pengauditan yang berbeda-beda dengan tetap mengindahkan Kode Etik sebagai Auditor. Workshop risiko dapat dilakukan oleh tim Audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama Proses Audit dilaksanakan. Dan kemudian, Auditor akan menyusun rencana audit sesuai workshop atau diskusi yang sudah dilakukan oleh tim Audit.

3. Menjadwalkan Rapat Terbuka

Auditor perlu mengundang Manajemen Senior, General Affair, atau Staf Administrasi Utama dari pihak klien ke suatu Rapat Terbuka. Di dalam Rapat Terbuka, Auditor akan mempresentasikan Ruang Lingkup Audit (Audit Scope), lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait pelaksanaan Audit. Setiap Kepala Departemen dari pihak klien dapat diminta tolong untuk mengomunikasikan kepada staf bawahannya tentang kemungkinan adanya wawancara dengan Auditor.

4. Mulai Melakukan Kerja Lapangan

Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari Rapat Terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan Rencana Audit. Kerja Lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau Prosedur dan Proses Audit. Auditor akan menguji kepatuhan klien terkait pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut benar-benar dijalankan secara reliabel dan memadai. Auditor dapat mendiskusikan suatu masalah saat masalah tersebut muncul kepada klien untuk memberi klien tersebut kesempatan untuk memberikan feedback.

5. Menyusun laporan

Auditor menyiapkan Laporan Audit yang berisi rincian temuan-temuan audit selama Proses Audit dilaksanakan. Laporan Audit akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak material, pembayaran yang diotorisasi tetapi tidak dibayar, dan temuan-temuan lainnya. Auditor kemudian akan menulis komentar terkait temuan-temuan audit dan merekomendasikan solusinya kepada klien.

6. Menyiapkan Rapat Penutupan

Auditor meminta tanggapan dan persetujuan dari klien terkait masalah dan temuan dalam Laporan Audit pada Rapat Penutupan. Dan Auditor juga tidak lupa untuk menjelaskan deskripsi rencana aksi manajemen untuk mengatasi masalah dan temuan tersebut serta tanggal penyelesaian yang disepakati. Pada Rapat Penutupan, semua pihak yang terlibat akan mendiskusikan Laporan Audit dan tanggapan manajemen secara matang. Jika terdapat masalah lain, mereka akan langsung menyelesaikan dan mencari solusinya pada Rapat Penutupan.

f. Tahap-Tahap Audit Operasional

Menurut Arens dan Loebbecke, ada tiga tahap yang dilakukan dalam melakukan audit operasional yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Seperti dalam audit laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan lingkup penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional, juga perlu menentukan staff yang tepat dalam penugasan, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasional, memakai struktur pengendalian

intern, serta menentukan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan. Perbedaan utama antara perencanaan audit operasional dengan audit laporan keuangan adalah sangat banyaknya keragaman dalam audit operasional. Oleh karena keragamannya, seringkali sulit menentukan tujuan khusus pada suatu audit operasional, sehingga tujuannya akan didasarkan pada kriteria yang dikembangkan untuk penugasan.

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

Dengan cara yang sama seperti pada audit keuangan, auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti yang kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji.

3. Pelaporan dan tindak lanjut

Dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan keuangan yang mempengaruhi laporan audit operasional. Pertama, dalam audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya untuk pihak manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diperiksa. Tidak adanya pemakaian pihak ketiga, mengurangi pembakuan kata-kata dalam laporan audit operasional. Kedua, keragaman audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi.

2.3 Pengertian Internal control

Menurut Hiro (2001: 1) pengertian *Internal Control* adalah suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan .

Menurut rudi susatyo (2003 : 2) *Internal control* adalah aparat yang tugas sehari-hari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu dengan melakukan verifikasi dan fungsi pengendalian lainnya terhadap transaksi yang terjadi pada cabang tersebut. Sedangkan menurut arthur dan david (2002 : 152) adalah bagian penilaian independen yang ada dalam organisasi untuk mereview operasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen. Peran *Internal control* dalam suatu perusahaan membantu manajemen dengan bertindak sebagai penasehat manajemen dalam melaksanakan fungsi.

2.4 Manajemen Resiko Operasional

a. Pengertian Resiko

Dalam peraturan Bank Indonesia (PBI 5/21/DPNP/2003), resiko adalah proses terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Menurut barmantyo (2006 : 16) resiko adalah ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Dalam definisi ini terlihat jelas bahwa dampak terjadinya resiko sekecil apapun akan menyebabkan loss bagi perusahaan.

Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Manajemen resiko diperlukan untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan
2. Memungkinkan untuk melakukan aktifitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Tujuan Manajemen risiko

Tujuan kebijakan manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan bank.

Tujuan manajemen resiko adalah, Adiwarmanto (2005 ; 225) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *uncontrollable*
3. Meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *uncontrollable*
4. Mengukur eksposur dan pemusatan resiko
5. Mengalokasi dan membatasi resiko

c. Penyebab risiko

Dari berbagai jenis resiko yang harus dikelola oleh bank, dalam pandangan audit operasional resiko yang mendapat perhatian lebih adalah resiko operasional. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya resiko ini, Adiwarmanto (2004 : 275) yaitu:

1. Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengalaman, perselisihan dan sebagainya.

2. Proses, dan
3. Sumber daya.

Dalam resiko operasional, resiko-resiko muncul antara lain:

1. Resiko reputasi

Resiko ini akan sangat berpengaruh terhadap manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip perbankan dan publikasi. Penyebab terjadinya penurunan reputasi antara lain kesalahan manajemen, pelanggaran peraturan dan fatwa, skandal keuangan, kurang kompeten, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, adanya keraguan akan integritas bank dan *performance* keuangan yang kurang baik

2. Resiko kepatuhan

Resiko ini lebih banyak disebabkan tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan yang ada baik internal dan eksternal seperti:

- a. Kepatuhan Giro Wajib Minimum (GWM), *net poen position*, *Net perfoming Financing* dan batas maksimum pemberi pembiayaan
- b. Ketentuan dalam penyediaan produk
- c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan

- d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia (BI) maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- e. Ketentuan perpajakan
- f. Ketentuan dalam akad kontrak
- g. Ketentuan dari Dewan Syariah Nasional

3. Resiko strategis

Resiko ini bersumber pada penetapan dan pemilihan strategi yang tidak dapat. Indikasi dalam resiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi baik dalam target keuangan maupun non keuangan

4. Resiko transaksi

Resiko transaksi merupakan resiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

Penyebab timbulnya resiko ini, antara lain, kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad perjanjian, kekeliruan dalam penetapan akad. Kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi serta adanya pos-pos terbuka

5. Resiko hukum

Dalam kaitan dengan resiko ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “*legal watch*” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap resiko hukum
- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam efektifitas dan *enforceability*

Manajemen resiko yang efektif membantu suatu organisasi untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait:

- Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari
- Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.

b. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup

- Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
- Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.

c. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate goverment*)

d. Strategi penyesuaian risiko (*risk- adjusted*) pada saat pengambilan keputusan

e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap

- Keuntungan
- Nilai saham

f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*)



- g. Memahami proses bisnis kunci
- h. Sistem peringatan dini dan respons bencana yang efektif
- i. Peningkatan keamanan informasi.

2.5 Administrasi pembiayaan

Bank sebagai lembaga yang mengutamakan jasa sebagai dasar usahanya, harus memenuhi kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Salah satu cara memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam hal ini nasabah adalah dengan memelihara administrasi yang memenuhi kaidah-kaidah pencatatan yang baik. Bank Indonesia sebagai regulator tertinggi perbankan di Indonesia juga mensyaratkan agar bank-bank umum di Indonesia memiliki produser dari tata kelola administrasi yang tertata dengan bank.

Sebagai lembaga yang memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, bank akan berhadapan dengan banyak resiko. Oleh sebab itu bank sebagai lembaga yang memberikan pinjaman diharapkan dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan pengendalian administrasi yang diharapkan dapat memperkecil resiko dimasa yang akan datang.

Menurut Rudi Susatyo (2003 : 3), aspek penting yang dapat mendukung serta menjamin berjalannya sistem pengendalian administrasi pembiayaan adalah dengan terpeliharanya dengan baik file-

file pembiayaan debitur dibank serta monitoring para pembina debitur berjalan dengan baik.

Terpeliharanya administrasi pembiayaan nasabah debitur merupakan syarat penting dari pengendalian, hal ini dikarenakan data-data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis dan keputusan pembiayaan bank harus terjamin dalam ketetapan dan kelengkapannya.

Administrasi pembiayaan yang lengkap adalah dokumentasi yang mencakup seluruh informasi atau data yang penting dan relevan dimana sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan oleh pihak bank maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. dalam pedoman pembiayaan bank syariah mandiri, administrasi pembiayaan adalah berkas yang berkaitan dengan pemberi fasilitas pembiayaan yang harus disimpan dan diadministrasikan oleh bank. Dalam peraturan ini mengatur tentang tata cara penyerahan, penyimpanan, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut administrasi pembiayaan.

Setelah mengetahui pentingnya administrasi pembiayaan dalam aspek dokumentasi, maka segala administrasi pembiayaan yang baik tidak akan terlaksana tanpa aparat yang mampu melakukan pekerjaan administrasi pembiayaan yang baik. Aparat atau dikenal dengan fungsi administrasi pembiayaan adalah aparat

yang melakukan tugasnya dalam hal yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yaitu menyangkut pencairan, penurunan, perubahan sampai pelunasan fasilitas pemberian pembiayaan.

Fungsi administrasi pembiayaan merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan dan mulai proses awal pencairan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas. Dalam melakukan pekerjaannya seorang aparat administrasi pembiayaan di

pandu *job description* yang telah ditetapkan. *Job description* antara lain:

1. Melaksanakan dropping/pencairan pembiayaan
2. Melaksanakan perubahan fasilitas pembiayaan
3. Melakukan pembebanan pembayaran cicilan debitur
4. Melakukan transaksi pelunasan pembiayaan
5. Melakukan proses akhir bulan (*End of Mounth*)
6. Monitoring Neraca dengan List Saldo
7. Pembuatan laporan yang berhubungan dengan perkembangan pembiayaan
8. Sebagai *Lead keeper* terhadap sub buku yang merupakan pos-pos terbuka berhubungan dengan akuntansi pembiayaan.

Seorang petugas yang melakukan fungsi administrasi pembiayaan harus mampu bersikap informatif dalam memberikan kebutuhan akan data-data kualitatif dan kuantitatif yang relevan serta mampu menjelaskan secara kronologis dan aktual yang berhubungan dengan administrasi dan akuntansi pembiayaan. Selain itu fungsi ini juga harus mampu meminimalisir kesalahan dalam hal administrasi dan akuntansi pembiayaan mengingat fungsi ini merupakan fungsi yang akan membukukan pendapat bagi bank. Kesalahan dalam hal administrasi dan akuntansi akan berdampak besar terhadap kelangsungan bank sebagai lembaga yang berorientasi pada profit.

2.6 Penelitian terdahulu

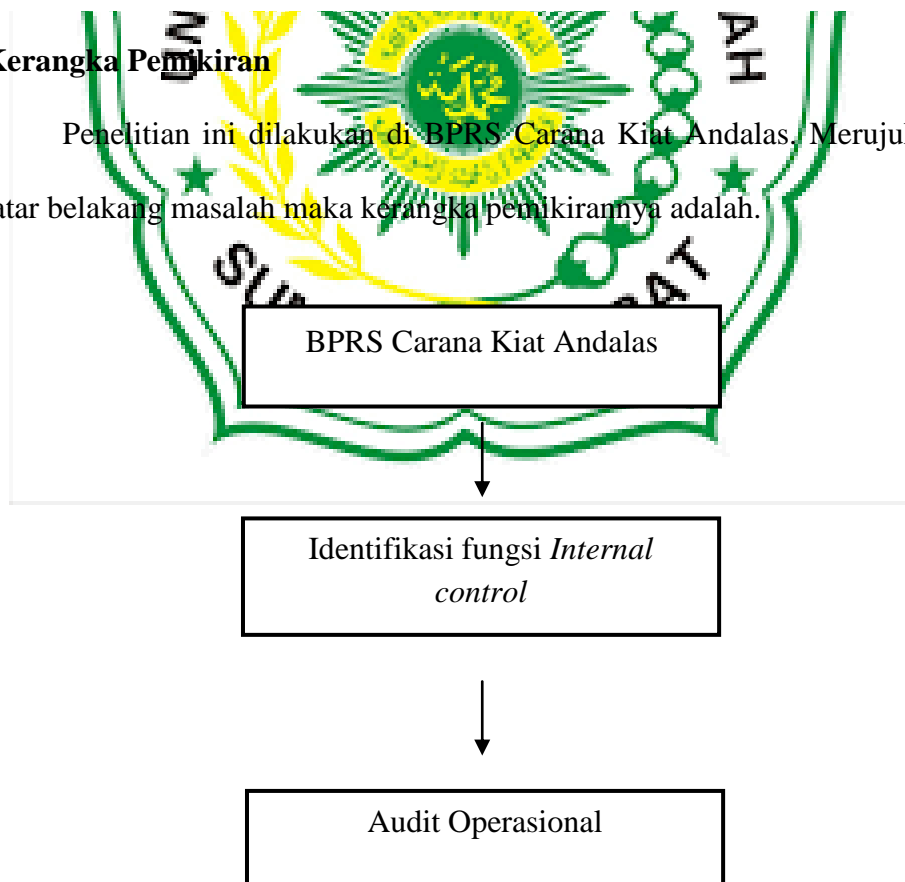
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hadi (2009)	Audit operasional oleh fungsi Internal control terhadap bagian administrasi pada PT. Bank Syariah mandiri	Deskriptif	Fungsi Internal Audit dalam pengawasan kredit pada PT. Bank Syariah mandiri KC Bukittinggi dapat dikatakan cukup baik dan cukup

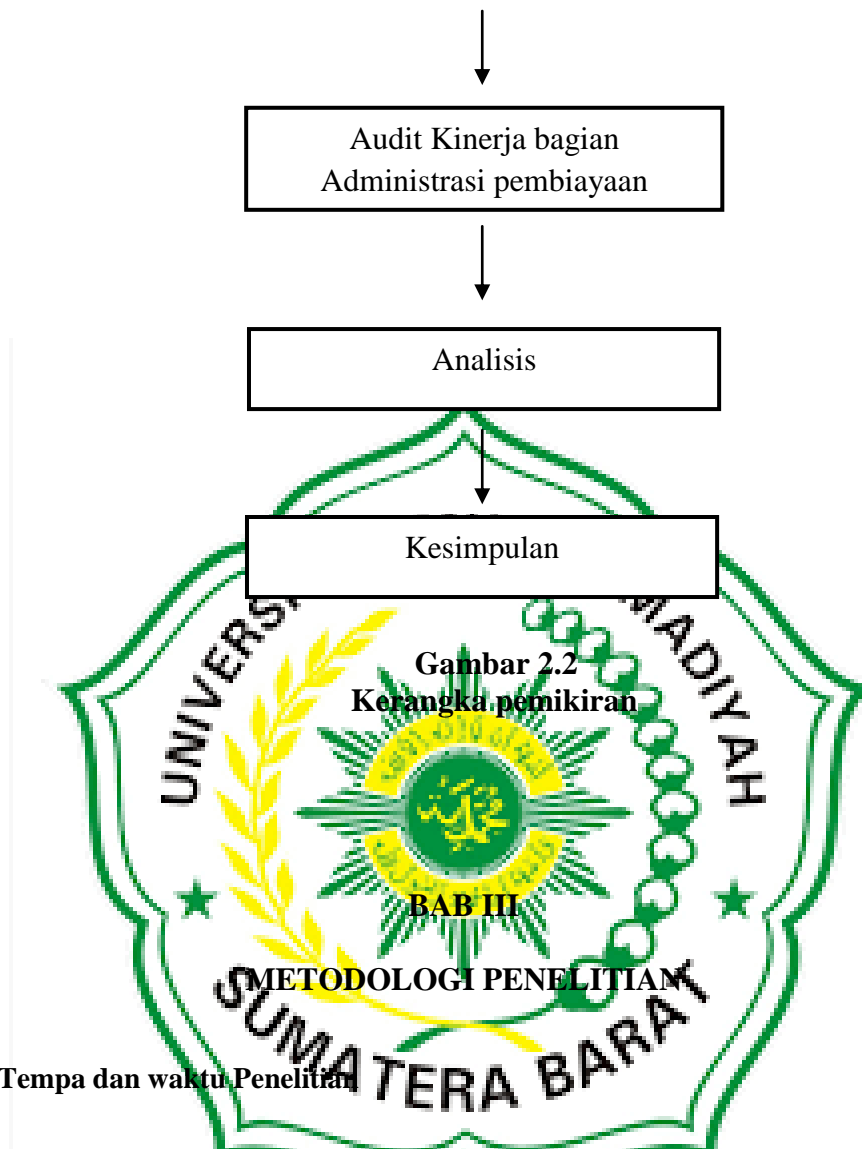
		KC Bukittinggi		memuaskan.
2.	Amelia (2012)	Peranan Internal Audit dalam pengawasan kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri)	Deskriptif	PT Bank Syariah Mandiri cabang Bukittinggi sudah menerapkan pemisahan wewenang terhadap pelaksanaan Audit Operasionalnya oleh fungsi khusus yaitu <i>staff internal control</i>
3.	Novriani (2014)	Peranan Audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank nagari KC Ujung gading kabupaten	Deskriptif	Auditor Operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada standar pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

		Pasaman barat		
--	--	---------------	--	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di BPRS Carana Kiat Andalas. Merujuk pada latar belakang masalah maka kerangka pemikirannya adalah.





3.1 Tempa dan waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BPRS carana kiat Andalas Jl. Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh, Nagari Padang Luar, Padang Lua, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan antara bulan juni sampai agustus 2020.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskriptifkan, menganalisis, serta mesinterprestasikan sesuatu, seperti kondisi, pendapat yang berkembang, atau tentang gejala yang berlangsung.

Menurut Arief (2007:447) penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk penetapan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti tahap ini dilakukan dengan cara survei langsung dan wawancara pada bagian terdekat dengan objek penelitian, untuk memperoleh data yang akurat.

Dalam metode ini terdapat dua acara yang dilakukan :

a. Metode observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melihat dan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan menggunakan sumber data dalam perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan agar mendapatkan data dari yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan/ lembaga tersebut.

2. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh informasi yang bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam pembahasan karya ilmiah ini. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari baik dari buku-buku yang khusus mencatat topik ini, maupun dari catatan-catatan perkuliahan yang ada pada penulis.

3. Dokumentasi

Metode yang digunakan penulis dengan memahami dan mempelajari berbagai dokumen yang bersumber dari perusahaan, seperti transaksi-transaksi dalam perusahaan dan laporan keuangan serta data lain yang dibutuhkan.

3.4 jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli guna memperoleh keterangan yang selanjutnya diolah untuk kebutuhan penelitian. Data yang diambil dengan cara wawancara dan tanya jawab dengan manajer.

2. Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang diperoleh dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini. Data ini berupa dokumen laporan keuangan dan dokumen lainnya.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif* kualitatif. Dalam buku Sugiyono (2010 : 13). Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Dimana di dalam analisis deskriptif ini melakukan analisis dalam proses kegiatan penelitian menggunakan daftar pertanyaan untuk menejer BPRS Carana Kiat Andalas yang berkaitan dengan audit operasional yang diterapkan dengan studi lapangan dan analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum PT. BPRS Carana Kiat Andalas

2.2.1 4.1.1 sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas

PT. BPRS Carana Kiat Andalas didirikan oleh 10 orang mantan gerakan pemuda Benuhampu dengan semboyan "*Untuk Nusa kubangun desaku*". Mereka berkeinginan untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat yang berdasarkan Syariah Islam yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta tertanggal semenjak bulan Mei 1997. Kantor pusat PT. BPRS Carana Kiat Andalas berlokasi di jalan Simpang 4 Padang Luar, Ladang Laweh Bukittinggi.

PT. BPRS Carana Kiat Andalas didirikan dengan akte notaris Ny. Asni Sayat Lathirf SH Nomor 739 tanggal 30 November 1997, dan telah mendapat izin resmi dari Departemen kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2 2002 HT. 01 01 Tahun 1997 tanggal 11 february 1997. Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas terdiri atas 17 orang dengan modal awal sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan modal awal disetor Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di antaranya:

1. Prof. Dr. H Amir Syamsudin
2. Drs muslim Mu'yani

3. H. darnis habib
4. H. Darsyah
5. H. Anas
6. Ir. H. Salmen Sayuti
7. Ir. H. Zaizar marwadi
8. Drs. H. Jusfar Maulana
9. H. Willem nastin
10. H. Oesman Zen
11. Drs. H Nizar chan
12. Dra. Zuraida
13. Prof. Dr. Azwar Agoes
14. Ir. Edi Yosi
15. Drs. H. Darias
16. H. Zulharbi Salim



Pengoperasian PT. BPRS Carana Kiat Andalas mendapat respon yang positif dan *support* dari semua masyarakat di wilayah Banuhampu, PT. BPRS Carana Kiat Andalas merupakan lembaga monumental untuk pengembangan Kecamatan Banuhampu secara keseluruhan.

Sesuai dengan perkembangan usaha dan kinerja manajemennya, tentunya ekspansi PT. BPRS Carana Kiat Andalas akan sanggup melalui batas-batas daerah kecamatan banuhampu karena PT. BPRS Carana Kiat Andalas sudah mempunyai

pasarnya sendiri. PT. BPRS Carana Kiat Andalas juga sanggup mendapatkan nasabah yang lebih banyak, bukan hanya untuk daerah Banuhampu saja.

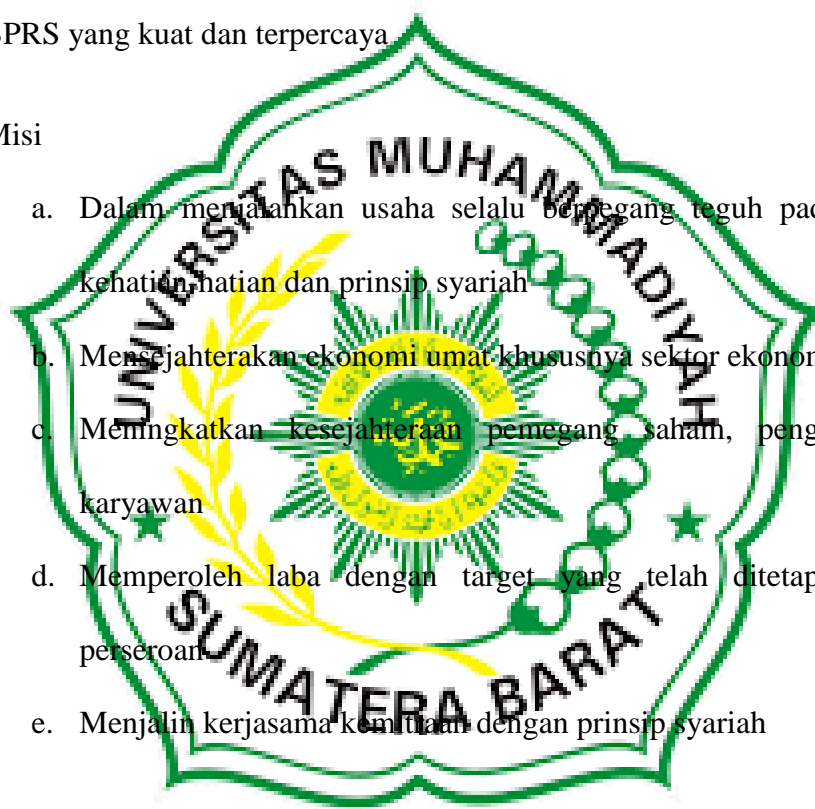
4.1.2 visi dan misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas

1. Visi

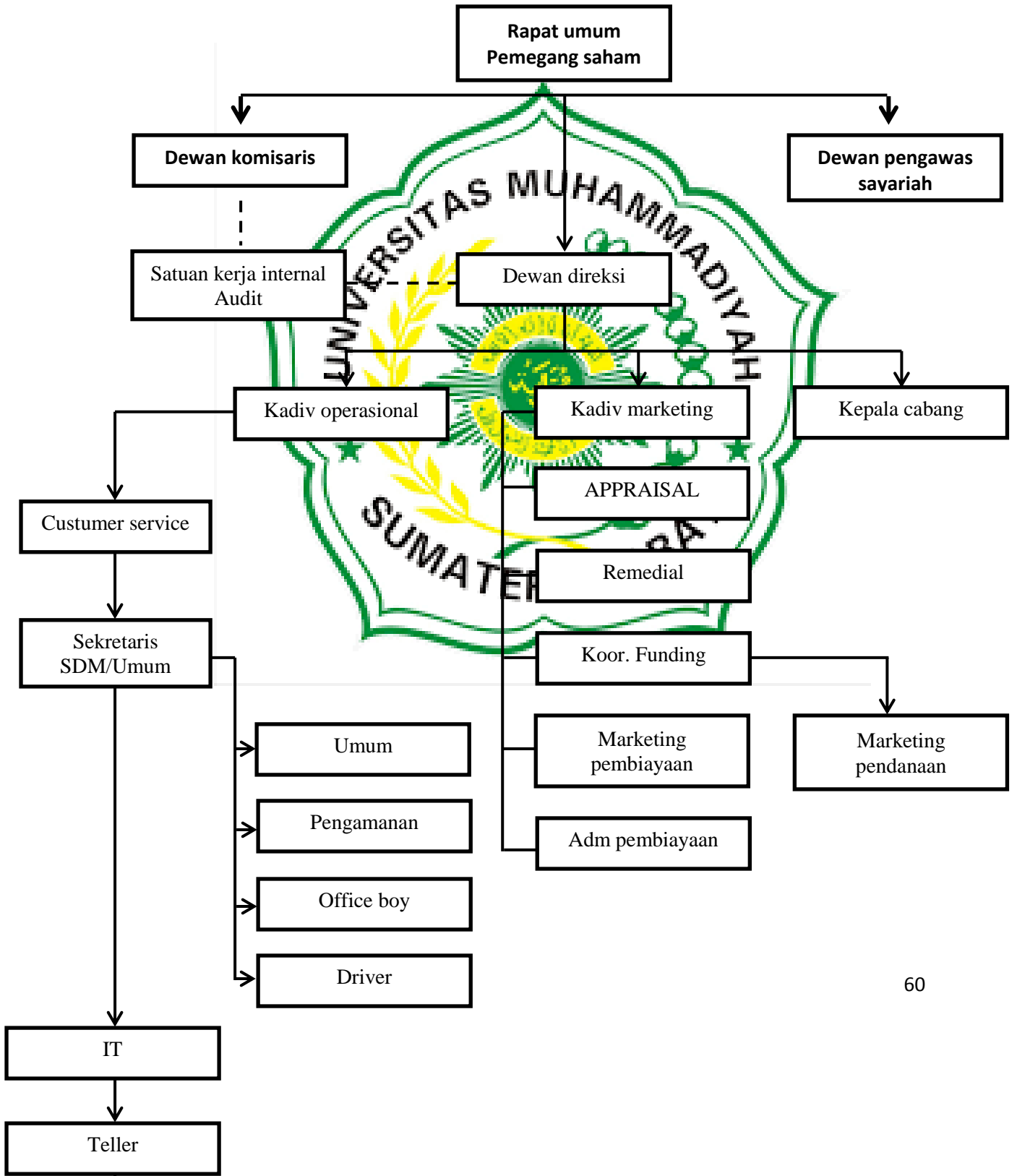
Visi dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah terwujudnya BPRS yang kuat dan terpercaya

2. Misi

- a. Dalam menjalankan usaha selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- b. Mensejahterakan ekonomi umat khususnya sektor ekonomi mikro.
- c. Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pengurus dan karyawan
- d. Memperoleh laba dengan target yang telah ditetapkan oleh perseroan
- e. Menjalin kerjasama komunal dengan prinsip syariah



2.2.2 4.1.3 Struktur organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas



Keterangan struktur organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas



The logo of Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat is a green shield-shaped emblem. It features a central sun with rays, a green wreath, and a chain of white beads. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in a semi-circle at the top, and 'SUMATERA BARAT' is written in a semi-circle at the bottom. Two green stars are positioned on the left and right sides of the emblem.

Dewan pengawas syariah	: DR. Ismail Novel, M.Ag
Dewan komisaris	: Muhammad Safar Nasir, MS,i Yuzardi Majidi, Ic
Dewan direksi	: Yayan Adi Saputra, Sa Leni Agustina Sari, Amd
Kepala cabang	
Padang panjang	: Gustiawati, SE
Payakumbuh	: Sony Yendra
Satuan kerja internal Audit	: Romie syahril, SE, Ak
Kadiv operasional	: Afraldi, SE
<i>Customer service</i>	: Rahmawati, Amd
Sekretaris SDM	: Emsa Nuhaila
IT	: Rahmawati, Amd
<i>Teller</i>	: Windy Nazola
Pembukuan	: Amrina
Pengamanan	: Muhammad Nur
Kadiv marketing	: Afridal. S.E
Appraisal	: Amril
Remedial	: Remdial Dedi,SE
<i>Funding</i>	: Syahra Nisfu, Aulia Putri, Fatma Annisa, Megi farli, Rizky Eka Putra
Pembiayaan	: Andrizal Sabarudin, Yusrinto

2.2.3 4.1.4 Job Description-PT. BPRS Carana Kiat Andalas

1. Pemegang saham

Pemegang saham adalah pihak yang menyetor modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan. Dengan kata lain pemegang saham merupakan pemilik dari sebuah perusahaan.

Pemegang saham di BPRS Carana Kiat Andalas sebelumnya murni dari perantau asal Benuahampu dan sekarang dipegang oleh Muhammadiyah.

2. Dewan komisaris

Dewan komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham perusahaan. Tugasnya adalah untuk menunjukan dan mengontrol semua aktivitas bank untuk menjamin bahwa bank telah bekerja sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas mengawasi, mengarahkan kegiatan bank untuk menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan pedoman dan prinsip syariah islam. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan bimbingan dan nasehat, dan pertimbangan agar sistem operasional dan produk yang dikeluarkan bank tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah dalam *muamalah*.

4. Satuan Kerja Internal audit

Satuan kerja internal audit atau disingkat SKAI adalah petugas untuk menganalisa laporan keuangan untuk menilai sesuai dengan prosedur atau prinsip akuntansi yang berlaku.

5. Dewan Direksi

Direksi bank adalah pelaksana tugas harian dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Direksi memiliki tugas untuk mengarahkan seluruh tingkatan manajemen agar bisa melaksanakan semua keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga berkewajiban memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan lainnya kepada pegawai agar bank berjalan dengan lebih baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada customer.



Dewan direksi terbagi atas dua, yakni Direktur Utama dan Direktur. Seorang Direktur Utama (DIRUT) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. Di bidang keuangan Dirut memiliki wewenang untuk mengandalikan keuangan, mulai dari pendapatan, hasil penagihan rekening, pembelanjaan, hingga perencanaan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan. Dirut juga bertugas untuk memimpin seluruh Dewan atau Komite Eksekutif, serta memimpin rapat umum. Guna memastikan pelaksanaan tata tertib berdasarkan tindakan dan kebijakan, serta memastikan bahwa kesempatan dan keahlian telah terdistribusi dengan baik dan benar.

Sedangkan seorang Direktur bertugas untuk mengatur semua menejer yang ada di bawahnya yang meliputi prosedur kegiatan, tujuan dan misi, kebijakan operasional, serta pengawasan dan kontrol terhadap para manajer dan bertanggung jawabannya. Direktur juga memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan, pemindahan (mutasi), dan pemberhentian karyawan.

Berikut bagian yang berada dibawah Dewan Direksi:

a. Kepala Divisi Operasional

Divisi Operasional memiliki bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan. Kepala Divisi Operasional bertanggung jawab atas bagian di bawah ini:

1) Sekretaris SDM /Umum

Sekretaris SDM adalah sebuah fungsi organisasi yang mengatur berbagai topik seperti manajemen kinerja kesehatan karyawan, kompensasi, gaji, pengembangan organisasi, keamanan, pelatihan kerja, administrasi karyawan, dan komunikasi karyawan. Sekretaris SDM membawahi bagian-bagian berikut ini:

a) Umum (*General Affair*)

General Affair memiliki tugas mensupport kegiatan operasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam melakukan tugasnya banyak melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk mengetahui kebutuhan mereka serta merencanakan anggaran pengadaan barang atau jasa beserta biaya pemeliharannya. Pengadaan seluruh peralatan dan kebutuhan kerja tidak terbatas pada alat tulis kantor, meja, kursi, komputer, AC (air conditioner) dan lain sebagainya. Tugas ini juga mencakup fasilitas dan sumber daya penunjang lain seperti kendaraan operasional, *office boy*, *cleaning service*, satpam, dan jasa lainnya.

b) *Security*

security merupakan bagian yang bertugas menjaga keamanan bank

c) *Office Boy*

Office Boy merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian seluruh ruangan kantor.

d) *Driver*

Driver merupakan bagian yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan perawatan mobil serta mengantar perjalanan bisnis dan mobilitasi dalam bekerja.

2) IT

Bagian IT ini bertugas sebagai pengelola dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan.

3) Pembukuan

Pembukuan merupakan bagian dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk membukukan segala aktifitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

4) *Customer service*

Customer service merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas melayani dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan nasabah.

5) *Teller*



Teller merupakan petugas yang berada pada posisi *frontliner* yang bertugas melayani nasabah dalam transaksi keuangan seperti penyetor dan penarikan uang.

b. Kepala Divisi *Marketing*

Kepala divisi marketing merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran bagian pemasaran dan terhadap hasil pendanaan dan pembiayaan. Kepala divisi marketing juga bertanggung jawab terhadap bagian-bagian berikut:

1) *Appraisal Bank*

Appraisal bank adalah penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mengecek kebenaran data antara dokumen pengajuan pembiayaan dengan kebenaran di lapangan, sekaligus melakukan transaksi bangunan guna menilai harga jaminan tersebut (penilaian jaminan)

2) *Remedial*

Remedial admin bertanggung jawab dalam pengelolaan penanganan pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan mengkoordinasikan serta mengoptimalkan kinerja/potensi seluruh anggota tim serta melakukan follow up terhadap masalah yang terjadi.

3) Koordinator pendanaan (*funding*)

Koordinator *funding* merupakan bagian yang mengepalai para marketing *funding officer* yang bertugas mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk

menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Mereka juga bertugas memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan diluar perbankan itu sendiri.

4) *Marketing* pembiayaan (*Lending*)

Secara umum *marketing* pembiayaan memiliki tugas dalam menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun oleh *marketing funding* kepada masyarakat, lembaga instansi, ataupun pihak swasta dalam bentuk pinjaman.

5) Administrasi Pembiayaan

Bagian yang melakukan analisa dan pengecekan jaminan dan kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah. Serta melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan nasabah.

c. Kepala cabang

Kepala cabang bertugas memimpin kantor cabang ditempat kedudukan dan bertindak atas nama direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungannya dalam kegiatan usaha bank.

2.2.4 4.1.5 Produk dan layanan PT. BPRS Carana Kiat Andalas

1. Produk pendanaan iB BPRS Andalas

a. Tabungan iB Wadiah diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.

Tabungan iB Wadiah merupakan produk tabungan dengan

menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* atau titipan, dengan nasabah berhak mendapatkan bonus sukarela dari pihak bank atas dana yang dititipkan

b. Tabungan iB *Mudharabah* Andalas

Tabungan iB *Mudharabah* Andalas ini merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* bersepakat bahwa tabungan yang dititipkan akan dikelola oleh bank, dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati.

c. Deposito iB *Mudharabah* Andalas

Deposito iB *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat diambil di waktu-waktu tertentu dan dengan jumlah simpanan besar. Deposito ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* bersepakatan bahwa tabungan yang dititipkan akan dikelola oleh bank, dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati

2. Produk pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas

a. Pembiayaan *Murabahah* Andalas

Pembiayaan *Murabahah* Andalas adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kerja sama dua orang atau lebih pihak, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk pembiayaan ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *shaahibul maal* dan keahian *mudharib*.

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik, bentuk dari kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang dengan tingkat bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

3. Produk jasa lainnya

- a. Transfer online antara bank
- b. Pembayaran listrik, PDAM, telepon
- c. Pembayaran cicilan mobil dan motor

4.2 Prosedur Pembiayaan BPRS Cara Kiat Andalas

2.2.5 4.2.1 Wilayah ekspansi Pembiayaan

Batas wilayah pembiayaan antar cabang di tetapkan oleh direksi setelah menerima usulan dari setiap Pimpinan cabang dengan beberapa pertimbangan:

1. Keamanan dan prinsip kehati-hatian
2. Kemampuan kesanggupan pimpinan cabang dan *Account Officer* (AO) dalam memberikan pengarahannya terhadap pembiayaan yang telah dan akan diberikan
3. *Kolektibilitas* pembiayaan yang diberikan.
4. Potensi pertumbuhan Ekonomi dan perkembangan penduduk wilayah yang dipilih dalam menentukan wilayah ekspansi pembiayaan sehingga bisa ditentukan jumlah dan besar pembiayaan yang diberikan dan memiliki nilai ekonomis.

Pada aturan baru BPRS Carana Kiat Andalas menetapkan untuk jangkauan wilayah ekspansi pembiayaan adalah 25 km dari kantor cabang pengelola pembiayaan. Jika layanan pembiayaan diberikan kepada nasabah yang berada di luar wilayah ekspansi dari satu pimpinan cabang, maka harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direksi. Seterusnya Direksi akan meninjau wilayah ekspansi pembiayaan berdasarkan perkembangan cabang dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya. Pembiayaan diluar

4.2.2 Persyaratan administrasi Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas

- 1) Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan:

- a. Surat tanda bukti diri (KTP/Pasport)
 - b. Kartu keluarga (KK)
 - c. Buku Nikah
 - d. Pas photo
 - e. SIUP / Surat keterangan usaha dari Wali Nagari atau Lurah
 - f. NPWP dan Anggaran dasar (khusus badan usaha)
 - g. Mempunyai jaminan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak
- 2) Persyaratan untuk calon nasabah Pegawai:
- a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan secara tertulis
 - b. Surat rekomendasi pimpinan
 - c. SK asli kepegawaian
 - d. Surat kuasa pemotongan gaji
 - e. Syarat lain sesuai dengan ketentuan lainnya
- 3) Persyaratatan untuk calon nasabah karyawan:
- a. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis.
 - b. Jaminan JHT (jaminan hari tua), jika saldo JHT tidak tidak mencukupi maka harus ada jaminan tambahan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
 - c. Besar cicilan maksimal sepertiga gaji bruto
 - d. Jangka waktu maksiman 5 tahun
 - e. Untuk pembiayaan kepada pengurus dan pejabat eksekutif disetujui oleh salah seorang komisaris

4.2.3 Proses usulan *Account Officer* (AO)

Setelah persyaratan Administrasi telah dilengkapi oleh calon nasabah, maka proses selanjutnya diambil alih oleh bagian *Account Officer* (AO).

Prosedur yang dilakukan AO adalah:

1. Meneliti kelengkapan dokumen usulan pembiayaan dan menyakini kebenarannya serta menyakini jaminan dapat dikuasai secara umum
2. Melakukan *survey* tempat usaha dan tempat tinggal calon nasabah bersama pejabat pembiayaan dan mendokumentasikannya
3. Mencari informasi kepada relasi dagang (*trade dagang*)
4. Melakukan konfirmasi dari lembaga keuangan lainnya.
5. Membuat proyeksi keuangan nasabah
6. Menuliskan hasil penelitian, analisis keuangan, analisis kualitatif, ikhtisar pembiayaan serta memberikan saran layak tidaknya pembiayaan tersebut
7. Membuat usulan pembiayaan dalam satu file yang berisikan semua dokumen, jaminan dan hasil sistem informasi debitur (SID)
8. Menanda tangani usulan pembiayaan yang telah selesai dibuat dan membutuhkan paraf setiap dokumen sebagai tanda asli dan bukan palsu. Kemudian usulan pembiayaan pada kolom “jaminan” ditulis jaminan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan standar yang berlaku”.

9. Mengajukan usulan pembiayaan kepada pejabat pembiayaan yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan BWPP dan pejabat yang lebih tinggi harus meneliti kembali apa yang tersebut dalam poin 1,2,3,4,5 dan 7 diatas.

2.2.6 4.2.4 Analisa pembiayaan

Setiap usulan pembiayaan harus dilengkapi dengan analisis pembiayaan calon nasabah, diantaranya penjelasan secara tegas dan terperinci tentang tujuan meminta pembiayaan serta sumber dan untuk pembayaran kembali. Karena dalam pembiayaan yang berlandaskan dengan syariah Islam sangat melarang penggunaan dana pada hal-hal yang diharamkan juga termasuk sumber dana pengembalian.

Dalam usulan pembiayaan harus dilihat apakah pembiayaan yang diajukan Pembiayaan baru atau menambah dari platform pembiayaan yang sedang berjalan.

Latar belakang, biodata calon nasabah atau perusahaan dan bentuk badan hukum juga perlu diperhatikan dalam menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan serta hubungannya dengan BPRS Carana Kiat

Andalas selama ini.

Setelah analisa dilakukan, komite pembiayaan akan memeriksa kembali rekomendasi yang telah dijalankan oleh petugas pembiayaan dan setelah itu komite pembiayaan akan mengeluarkan rekomendasi apakah pembiayaan yang diajukan bisa dicairkan atau tidak.

4.4 Audit Operasional Pembiayaan

2.2.7 4.4.1 Audit bidang pembiayaan

dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Romi syahril selaku *Internal Control* di BPRS Carana Kiat Andalas dijelaskan bahwa audit bidang pembiayaan merupakan kegiatan Audit yang dilakukan terhadap bidang pembiayaan, dari mulai proses pengajuan, pencairan sampai dengan pembiayaan tersebut dilunasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan dari audit pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Meyakini legalitas usaha nasabah sesuai dengan Undang-undang atau ketentuan yang berlaku
2. Menyakini proses permohonan, investigasi, analisis untuk menilai kelayakan pemberian Pembiayaan, kewajaran jumlah pembiayaan dan keputusan persetujuan pembiayaan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku
3. Memastikan pencairan pembiayaan dilakukan setelah persyaratan yang ditetapkan dipenuhi oleh nasabah
4. Monitoring terhadap pengguna pembiayaan pengamanan jaminan dan pemenuhan kewajiban nasabah
5. Meyakini pencatatan pembiayaan telah dilakukan dengan benar.

6. Memastikan administrasi dan penyimpanan dokumen pembiayaan dilakukan dengan aman dan tertip
7. Memastikan semua telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip syariah

2.2.8 4.4.2 Landasan ketentuan Audit operasional pembiayaan

1. Peraturan Bank Indonesia

Pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat oleh BPRS Carana Kiat Andalas berlandaskan kepada peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/pbi/2015 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 14/22/pbi/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Pemberian Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas adalah yang paling dominan diberikan adalah pembiayaan dengan akad Murabahah dan Produk tersebut merujuk pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

4. Fatwa Dewan Syariah nasional atau Opini Dewan Pengawas Syariah
Untuk pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas khusus jual beli dengan akad Murabahah, maka dalam proses Audit Operasional merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11 IDSN-MUI/XI/2017.

5. Kebijakan Pembiayaan Internal BPR Syariah Carana Kiat Andalas (SOP Pembiayaan)

BPRS Carana Kiat Andalas tentunya memiliki standar dan prosedur dalam memberikan pembiayaan, dimana satuan kerja Audit Intern melakukan pemeriksaan mengikuti ketentuan-ketentuan dari 3 (tiga) landasan sebelumnya yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Audit Operasional pembiayaan.

2.2.9 4.4.3 Pendekatan dalam melakukan Audit Operasional Pembiayaan

1. Pendekatan inisiasi
Merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memvalidasi data dan identitas pemohon pembiayaan
2. Pendekatan Analisa
Merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah secara tepat dan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Pendekatan keputusan atau pencarian

Pendekatan yang dilakukan untuk melihat persetujuan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPRS maupun peraturan yang lainnya.

4. Pendekatan monitoring

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka pemantauan terhadap administrasi pembiayaan yang telah dipenuhi oleh nasabah, pengawasan terhadap jalanya pembiayaan yang sedang berjalan serta pemenuhan kewajiban nasabah lainnya.

5. Pendekatan *Collection/Remedial*

Pendekatan yang dilakukan terhadap pelunasan pembiayaan nasabah, restruktur pembiayaan nasabah, litigasi dan likuidasi agunan pembiayaan nasabah.

4.5 Program Kerja *Internal Control* BPRS Carana Kiat Andalas

Pada dasarnya program kerja Audit yang baru merupakan kelanjutan dari program kerja Audit sebelumnya. Walaupun ada perbedaan hanya dalam soal waktu pemeriksaan. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi BPRS pada saat pemeriksaan. Dimana pengawasan internal yang dilakukan di BPRS Carana Kiat Andalas dilakukan pada beberapa tahapan.

1. Harian.

Pemeriksaan harian dilakukan setiap 2 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan.

2. Periodik

Pemeriksaan periodik dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulanan dan setiap 1 tahun. Contoh audit periodik adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan, perkembangan pembiayaan, pelayanan nasabah, dan lain-lain.

3. Insidental.

Pemeriksaan insidental ini dilakukan sewaktu-waktu atau sifatnya mendadak tergantung kondisi yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan secara cepat dan segera. Contoh dari audit insidental adalah ketika ada petugas yang dapat rotasi penempatan, kenaikan jabatan, atau berhenti menjadi pegawai BPRS, maka audit intern akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap petugas yang bersangkutan.

Internal Control pada BPRS Carana Kiat Andalas bersifat independen dan bersifat netral yang merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham dan komisaris, maka setiap hasil kegiatan Audit yang dilakukan oleh *Internal Control* akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh *Internal Control* BPRS Carana Kiat Andalas terbagi menjadi 2, yaitu audit terhadap operasional dan marketing. Dalam proses audit operasional semua menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan mengarah kepada bagaimana pelaksanaan semua kegiatan yang ada didalam internal bank, termasuk bagaimana prosedur pembiayaan, pencatatan akuntansi, dan lain-lain. Dalam audit dalam marketing lebih mengarah kepada pelayanan nasabah, baik di

kantor maupun di lapangan. Termasuk juga bagaimana petugas marketing mengelola dan menjalin hubungan baik dengan nasabah pembiayaan.

4.6 Prosedur dan tata cara audit operasional

Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pemeriksaan yang dilakukan, bagian yang akan dilakukan pemeriksaan serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan, setelah itu dilakukan pemeriksaan seperti berikut:

A. menentukan jenis pemeriksaan

dalam melakukan pemeriksaan dapat menggunakan 2 (dua) jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pemeriksaan laporan

merupakan pemeriksaan yang dilakukan melalui laporan-laporan periodik yang harus disampaikan, misalnya laporan yang bersifat harian dan bulanan.

2. pemeriksaan stempat (*on the spot*)

merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi atau objek yang diperiksa dan dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung catatan-catatan yang ada, pemeriksaan ini terdiri dari:

a. pemeriksaan keuangan (*financial audit*)

- b. pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*)
- c. pemeriksaan operasional (*operastional audit*)

prosedur pemeriksaan di lokasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan pemeriksaan
- b. Menilai dari aktivitas pengendalian internal, dengan metode mempelajari struktur Organisasi, rangkaian tugas, buku petunjuk akuntansi, Prosedur Transaksi atau operasi serta arahan lainnya
- c. *comphance test*
- d. *substantive test*

B. menentukan Teknik pemeriksaan

merupakan cara yang dipakai oleh pemeriksaan untuk memperoleh pembuktian dalam mengkombinasikan keadaan di lapangan dengan keadaan yang semestinya, teknik tersebut antara lain:

- a. membandingkan

merupakan cara mencari kemiripan dan perbedaan antara 2(dua) atau lebih data/informasi

- b. Pemeriksaan Bukti Tertulis



merupakan teknik pemeriksaan dengan cara memeriksa asli atau tidaknya serta kelengkapan atau tidak bukti yang menggambarkan tentang transaksi.

c. *Scanning*

Merupakan penelaahan secara umum dan tepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

d. Rekomputasi

Menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatan

C. menentukan sample yang akan diperiksa

pemilihan sample yang akan diperiksa dilakukan dengan cara statistik atau dengan pertimbangan pemeriksa yang terdiri dari:

a. *hapharari sampling*

pemilihan sample yang betul-betul atas kehendak pemeriksa sehingga dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif pemeriksaan

b. *block sampling*

pemilihan sample dilakukan atas kehendak pemeriksa dengan menentukan kelompok untuk sample yang dipilih.


D. Lakukan pemeriksaan



Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Petugas menyiapkan kertas kerja pemeriksaan, yaitu berupa catatan-catatan yang dibuat dari data yang di kumpulkan oleh pemeriksa pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan.

E. mengumpulkan bukti pemeriksaan.

Bukti pemeriksaan merupakan informasi yang diperoleh selama pemeriksa melalui teknik pemeriksaan dimana bukti tersebut dapat diperoleh dari objek pemeriksaan, pihak luar atau dibuat sendiri oleh pemeriksa. Bukti pemeriksaan merupakan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan melalui teknik pemeriksaan dimana bukti tersebut dapat diperoleh dari objek pemeriksaan, pihak luar atau dibuat sendiri oleh pemeriksa. Bukti pemeriksaan harus cukup, berkompeten dan relevan serta objektif, jenis bukti pemeriksaan dapat berupa.

- 
- a. Bukti fisik
 - b. Bukti pemeriksaan
 - c. Bukti kesaksian
 - d. Bukti analisa
 - e. Bukti dari spesialis

F. Laporan hasil pemeriksaan

Laporan dari hasil audit disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris. Laporan tersebut terdapat informasi penting untuk dilaporkan, yaitu berupa temuan

yang objektif, kesimpulan dan rekomendasi yang menyakinkan. Penulisan laporan harus jelas, transparan, asli, lengkap dan bersifat konstruktif dan dilengkapi dengan bukti yang, relevan dan objektif.

G. tindak lanjut hasil audit

Pada tahap ini setiap objek yang dilakukan pemeriksaan harus diambil kebijakan dan tindakan perbaikan sehingga hasil temuan oleh pengawas tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang. langkah ini juga harus tetap dipantau oleh pemeriksa, jika pada batas waktu yang telah disepakati belum juga dilakukan perbaikan oleh audite, maka pengawas melakukan laporan kepada pihak yang membawahi langsung satuan kerja audit internal yaitu Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk menyampaikan temuan tersebut sehingga dikemudian hari pengawas tidak memiliki ketertarikan lagi dengan hasil temuan tersebut karena telah menyampaikan kepada pihak yang berwenang.

H. Dokumentasi

Semua berkas dokumen atau file yang telah dikumpulkan selama kegiatan pemeriksaan harus disimpan dan dijadikan sebagai file, karena berkas ini mempunyai fungsi yang penting.

4.7 pelaksanaan Audit Operasional oleh *Internal Control* terhadap pembiayaan di BPRS Carana kiat Andalas

Audit operasional pada pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas di laksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dalam standar dan prosedur satuan kerja Audit Intern. Dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan proses pembiayaan yang sehat, aman dan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pembiayaan BPRS Carana Kiat Andalas dan meminimalisasi risiko. Adapun pengawasan yang dilakukan adalah:

1. Memeriksa file dan dokumen pembiayaan nasabah (analisis pembiayaan, identitas diri nasabah, izin usaha, agunan dan bukti kepemilikan).

File dan dokumen merupakan bagian dari administrasi, bentuk, sifat, dan ruang lingkup yang sangat berpengaruh kepada proses kegiatan pembiayaan. Semakin kompleks proses administrasi pembiayaan, maka akan mempercepat proses pembiayaan diselesaikan. Proses audit ini biasanya dilaksanakan sekali dalam 3 bulan, memeriksa kembali kelengkapan file dokumen pembiayaan yang telah terjadi.

2. Memeriksa analisa pembiayaan yang mencakup 5C (*5C of financing*)

5 C yang di maksud adalah *character, capacity, capital, collecteral, condition.*

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian terhadap calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan dan kecukupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini dapat dilihat pada pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Selain itu, juga didukung dengan observasi di lapangan atas sarana dan prasarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Hal ini diukur dengan melihat posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon nasabah. Tujuan penilaian adalah untuk lebih meyakinkan bahwa jika terjadi risiko kegagalan pembayaran di kemudian hari, maka jaminan dapat dilelang sebagai pembayaran dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus bisa melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, untuk melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berpengaruh besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.



3. Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap jaminan, keaslian dokumen serta bentuk pengikatan terhadap jaminan nasabah tersebut.

Penilaian terhadap barang jaminan dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan. petugas Appraisal yang menilai aset seperti rumah, tanah, bangunan dan aset lainnya.

4. Memeriksa penetapan kualitas pembiayaan nasabah dan kecukupan PPAP telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

PPAP adalah upaya kebijaksanaan penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif atas risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektibilitas dalam artian nyata.

5. Mengawasi dan memeriksa pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS tidak melanggar atau melampaui BMPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencairkan pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain.

6. Mengawasi kesesuaian penanganan pembiayaan bermasalah (restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, pengambilan agunan) dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penanganan suatu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

7. Mengawasi penggunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh BPRS telah sesuai dengan akad yang dibuat dengan memperhatikan bukti penggunaan dana tersebut.

Monitoring dana pembiayaan dilakukan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan. Pengawasan dana pembiayaan juga berguna untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

8. Melakukan pemeriksaan terhadap pembiayaan yang dilakukan proses take over dari bank lain.

Take over adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia perbankan, dalam hal pihak ketiga (Bank) memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang/kredit di Bank pemberi kredit semula (kreditur awal) sehingga kedudukan pihak ketiga (Bank) menggantikan kedudukan kreditur awal. Naja(2019:1)

9. Melakukan inspeksi terhadap penyimpanan jaminan pembiayaan nasabah.

Jaminan pembiayaan diperlukan untuk melindungi Bank dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan atau hal-hal lainnya yang bersifat menimbulkan risiko kerugian untuk pihak bank, sehingga untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin.

10. Pemeriksaan kartu pembayaran angsuran pembiayaan.

Kartu pembayaran angsuran adalah kartu tanda bagi nasabah yang telah mengansur pembayaran pembiayaannya atau melihat sisa pembayaran yang harus dilunasi.

11. Pemeriksaan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah

Pemeriksaan ini dilakukan karena penyaluran dana oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank

12. Memeriksa dan memastikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di *cover* oleh asuransi selama masa pembiayaan dengan tujuan untuk mengamankan risiko terhadap pembebanan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Asuransi selama masa pembiayaan pada dasarnya adalah bentuk penjaminan pembiayaan yang meng-*cover* ketidakmampuan nasabah dalam melunasi sisa pinjaman kepada Bank sebagai akibat risiko meninggal dunia dan wanprestasi dari nasabah.

Hasil dari pelaksanaan audit operasional yang dijalankan oleh *internal control* adalah laporan berupa temua-temuan yang dinilai tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. *Internal control* juga menyampaikan apa yang harus di perbaiki dan penuh dari semua proses pembiayaan. Hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur dalam rapat hasil pemeriksaan. Hasil audit intern juga dilaporkan kepada Otoritas jasa Keuangan, dimulai pada tahun 2021

4.7.1 Audit Syariah atas Pembiayaan

Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa pembiayaan yang paling dominan diberikan oleh BPRS Carana Kiat Andalas kepada nasabanya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* (Jual-beli), maka Audit yang dilakukan lebih merujuk kepada aturan-aturan syariat Islam yang di fatwakan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Sebagaimana yang tercantum pada standar dan prosedur satuan kerja Audit Intern (SKAI) BPRS Carana Kiat Andalas.

1. Memastikan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

Dalam akad *Murabahah* tidak boleh ada barang atau objek pembiayaan yang diharamkan oleh islam, baik haram secara zatnya (Objek transaksi) maupun haram secara selain zatnya (cara bertransaksi)

2. Memastikan BPRS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin. Dalam hal nasabah

membayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BPRS kepada nasabah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa *platform* pembiayaan yang diberikan tidak akan mengalami perubahan diwaktu yang akan datang, besarnya ditentukan diakad awal yaitu sebesar harga beli ditambah margin. Dan untuk setoran awal dari nasabah telah mengurangi tagihan pembiayaannya.

3. Meneliti apakah *akad wakalah* telah dibuat oleh BPRS secara terpisah dari akad *murabahah* apabila BPRS hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga.

Akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Usman (2009:268). Dari definisi tersebut jika dilihat implementasinya bahwa pihak BPRS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan ke pihak ketiga. Tujuannya adalah agar barang yang dibeli sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut

4. Memastikan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BPRS yang dibuktikan dengan faktur atau kwintansi jual beli yang dapat dipertanggung jawabkan.

Didalam akad jual beli barang harus dimiliki oleh pihak BPRS, meskipun dalam pembelian objek pembiayaan diamanahkan kepada nasabah dengan akad *wakalah* , tetapi secara prinsip barang adalah

milik Bank karena antara akad *Murabahah* dan *Wakalah* adalah dua akad yang terpisah. Setelah nasabah membeli barang atau objek pembiayaan, maka nasabah wajib menyerahkan bukti/kwintansi jual beli kepada pihak Bank untuk melihat apakah barang yang dibeli sesuai dengan perjanjian awal.

5. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada BPRS

Dalam hal ini adalah peranan *Internal Control* di butuhkan untuk meneliti pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan

4.7 Pengendalian risiko terhadap administrasi pembiayaan BPRS Carana

Kiat Andalas

Dalam konteks teori keuangan dikenal istilah *risk return trade off* artinya makin besar imbal hasil yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Sebaliknya makin besar risiko yang ditanggung, maka seharusnya makin besar imbal hasil yang didapatkan.

Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian internal pada seluruh jenjang organisasi merupakan salah satu sebab terjadinya risiko dan juga menjadi faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank. Pengendalian internal dalam pengawasan operasional yang

efektif dapat membantu manajemen Bank dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan harapan dapat mengurangi risiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.

Pembiayaan yang terdapat pada BPRS Carana Kiat Andalas tentunya tidak lepas dari risiko bisnis yang besar yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan bank dan juga berdampak pada kesehatan Bank. Oleh karena itu, peranan *Internal Control* diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha BPRS Carana Kiat Andalas. Beberapa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas pada pelaksanaan akad *wakalah*, dijelaskan bahwa pembelian barang atau objek pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian tersebut diberi waktu selambatnya 15 hari. Namun yang sering terjadi adalah nasabah tidak menyerahkan bukti tersebut kepada pihak Bank. Dengan demikian jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka pembiayaan di BPRS sama saja dengan bank konvensional, yaitu sama saja dengan meminjamkan uang bukan jual beli barang dan sudah jelas tidak sesuai dengan akad *murabahah*. Tindakan atau solusi yang diambil oleh BPRS Carana Kiat Andalas setelah berkonsultasi dengan dewan syariah adalah dengan membangun mitra atau kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat pembelian barang, seperti perusahaan, toko, *showroom* dan lain-lain

sesuai kebutuhan. Dengan solusi tersebut nasabah dan Bank dapat terbantu. Bank dapat mengarahkan nasabah untuk membeli objek pembiayaan kepada mitra yang sudah berkerja sama dengan BPRS Carana Kiat Andalas dan nasabah juga terbantu karena tidak sulit lagi mencari barang yang dibutuhkan tersebut. Untuk keperluan bukti pembelian, sebagai keperluan administrasi pembiayaan, bank hanya tinggal menanyakan dan meminta bukti pembelian tersebut kepada mitra penyedia barang tersebut. Contohnya pembiayaan untuk satu unit sepeda motor, maka pihak BPRS tinggal mengarahkan nasabah untuk membeli sepeda motor di dealer yang sudah bekerja sama dengan BPRS Carana Kiat Andalas.

Selanjutnya, permasalahan yang sering ditemukan adalah masalah pembayaran angsuran, permasalahan ini muncul dengan berbagai sebab. BPRS Carana Kiat Andalas selalu meningkatkan peranan marketing pembiayaan untuk tetap menjaga hubungi baik dengan nasabahnya, agar dapat mengontrol perkembangan pembiayaan yang telah diberikan. Jika terjadi penunggakan angsuran, BPRS akan memberikan surat peringatan 1 (SP 1) jika penunggakan masih ada, maka akan diberikan surat peringatan yang kedua (SP 2) hingga surat peringatan ketiga (SP 3). Waktu yang diberikan antara masing-masing surat peringatan adalah 15 hari. Namun apabila nasabah masih belum mampu untuk melunasi kewajibannya, maka nasabah akan dipanggil untuk bermusyawarah mencari jalan keluar dari permasalahan yang hadapi.

BPRS Carana Kiat Andalas memiliki program *Re-strukturisasi* pembiayaan. *Re-strukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hariyani (2010: 129).

Program *restrukturisasi* di BPRS Carana Kiat Andalas diberikan tanpa ada penambahan jumlah pembiayaan, kecuali pada biaya-biaya administrasi seperti biaya notaris, karena pada restrukturisasi akan ada pengulangan akad pembiayaan. Setelah diberikan tenggang waktu dengan pemberian surat peringatan dan *Re-strukturisasi*, namun apabila nasabah masih belum mampu untuk melunasi pembiayaannya, maka pihak BPRS akan menarik agunan. Hal seperti ini dikenal dengan istilah *wanprestasi*.

Pembiayaan yang macet tidak hanya disebabkan karena nasabah yang *wanprestasi*, namun permasalahannya juga datang dari internal Bank. BPRS Carana Kiat Andalas pernah mengalami *collap* atau kerugian disebabkan karena kesalahan manajemen dalam mengambil ekspansi wilayah pembiayaan yang terlalu jauh, sehingga menyebabkan pembiayaannya sulit untuk dikontrol. Solusi yang diambil oleh manajemen BPRS Carana Kiat Andalas adalah dengan menetapkan jangkauan wilayah ekspansi pembiayaan adalah 25 km dari kantor cabang pengelola pembiayaan. Tetapi untuk pembiayaan khusus yang diluar wilayah tertentu, maka harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direksi, seperti pemberian pembiayaan kepada rumah sakit umum Aisyah dan para dosen di

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada pembiayaan tersebut dibuat suatu pengecualian yang disetujui oleh pihak direksi.

Kendala lain di BPRS Carana Kiat Andalas adalah kesiapan petugas pembiayaan dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan karena jika petugas terlalu lama dalam menyiapkan dokumen yang menyebabkan rentang waktu pemberian pembiayaan menjadi panjang, nasabah akan merasa jenuh dan nasabah tersebut akan pindah ke bank lain. Manajemen BPRS Carana Kiat Andalas juga memberikan surat peringatan bahkan pemberhentian kepada pegawai yang sering melakukan kesalahan dilihat dari jenis dan besarnya kesalahan yang dilakukan dan apakah menyebabkan kerugian terhadap BPRS Carana Kiat Andalas.

Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas juga terkena dampak pandemi *Covid-19*, pembiayaan yang terkena dampak itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada pedagang, karena penghasilan pedagang mengalami penurunan. Untuk membantu nasabah pembiayaan yang terkena dampak pandemi, manajemen BPRS memberikan solusi dengan program perpanjangan pembiayaan. Adapun ketentuan perpanjangan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan perpanjangan pembiayaan selambat-lambatnya 15 hari sebelum tanggal pelunasan sesuai dengan tanggal valuta
2. Nasabah yang terkendala dengan pembiayaannya memberikan alasan yang masuk akal kenapa pembiayaannya tidak dapat dilunasi pada jatuh

tempo. AO (*account officer*) akan memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan oleh nasabah tersebut.

3. bisnis nasabah yang bersangkutan masih dalam kondisi baik. AO melakukan pengecekan ketempat bisnis nasabah dan membuat laporan atas hasil audit.
4. Jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan BPRS.
5. Nasabah dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pihak BPRS, termasuk informasi tentang pembiayaan maupun persyaratan terhadap jaminan.



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Audit operasional oleh *Internal Control* terhadap bagian administrasi Pembiayaan pada BPRS Carana Kiat Andalas dilaksanakan dengan merujuk pada badan otoritas yang memiliki wewenang dalam menjalankan prosedur audit. Audit operasional terhadap administrasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh *internal control* BPRS Carana Kiat Andalas dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar dan Prosedur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Audit dilakukan sesuai dengan kondisi

BPRS saat itu. Dimana pengawasan internal yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu harian, periodik, dan insidental. Audit dilaksanakan di kantor pusat dan seluruh cabang BPRS Carana Kiat Andalas.

Audit pada bidang pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Peranan *internal control* dalam meminimalisir risiko-risiko pada pembiayaan sangat membantu manajemen Bank dalam memberikan pembiayaan. Dimulai dari persyaratan berke administrasi sampai pencairan dana semua diperhatikan dengan teliti mengikut standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dikemukakan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada pihak BPRS Carana Kiat Andalas, terkhusus kepada Audit intern diharapkan tetap untuk tetap mengedepankan posisi independennya dan menjaga netralitas dalam menjalankan Audit Internal.
2. Untuk selalu meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah dan juga meningkatkan kuitas SDM terutama pada petugas-petugas pembiayaan.

3. Diharapkan kedepannya BPRS Carana Kiat Andalas dapat menambah luas jangkauan ekspansi pembiayaan, supaya eksistensi BPRS Carana Kiat Andalas semakin terlihat di mata masyarakat sumatera barat.
4. Diharapkan BPRS Carana Kiat Andalas dapat bersaing dalam kompetisi *margin* dengan bank lain agar peningkatan nasabah pembiayaan dan penumbuhan aset BPRS Carana Kiat Andalas terus naik kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli.(2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andri, Soemitra.(2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana . Jakarta.
- Arens, A. Alvian dan Loebbecke, K. James, (1997). *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Indonesia, buku satu, Adaptasi Amir Abadi Jusuf, Salemba Empat,Jakarta.
- Amelia,(2010),”*Peranan Internal Audit dalam pengawasan kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri)*, fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang (Tidak dipublikasikan)
- “Basuki. (2000). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen, Berbasis Studi Kasus*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Boynton & Johnson, et al. (2013). *Modern Auditing, edisi 7, jilid 1*. Erlangga. Jakarta
- Furchan, Arief. (2007). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hery. (2017). *Auditing & Asuransi Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*. PT. Grasindo. Jakarta
- Hadi Busri,(2009),”*Audit Operasional oleh Internal Control terhadap bagian Administrasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi*”, fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang (Tidak dipublikasikan)
- Hariyani iswi. (2010) . *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet J*. PT. Elex media komputindo. jakarta
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen risiko Bank*. Raja grafindo persada. Jakarta
- Mulyadi. (2014). *Auditing buku 1*. Salemba empat. jakarta
- Marelis reni, Triyono Aris. (2019). *Manajemen Risiko*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Novriani,(2014),”*Peranan Audit Operasional dalam meningkatkan efektifitas kegiatan perkreditan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten*

Pasaman Barat”, fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Padang
(Tidak Dipublikasikan)

Naja Daeng. (2007). *Legal Audit Personal Bank*. Citra Aditya Bakti. Jakarta

Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI 5/21/DPNP/2003 Tentang *standar penerapan manajemen risiko*

Rai Gusti Agung. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik*. Salemb Empat. Jakarta.

Siagian,sondang,(2001). *Audit manajemen*.Bumi aksara. Jakarta

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabetta. jakarta

Soemitro, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group. Jakarta..

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sutanto, Hery. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Pustaka Setia. Bandung.

Suyatno thomas & abdullah azhar, et al. (2007). *Kelembagaan Perbankan* . Gramedia pustaka utama. Jakarta

Tunggal,Widjaja, et al,(1994). *Audit suatu pengantar*. Bineka cipta. Jakarta

Voni Astarari, (2011) *Peranan Audit Operasional dalam meningkatkan efektifitas kegiatan perbankan (Studi kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)*”fakultas Ekonomi, universitas andalas (tidak dipublikasi)

Zuhrawaty. (2009). *Panduan dan kiat sukses menjadi Auditor ISO 9001*. Medpress (Anggota IKAPI). Yogyakarta.

<https://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-audit-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/> di akses tanggal: 9 Februari 2020

eprints.polsri.ac.id di akses tanggal: 04 agustus 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/73975-ID-penerapan-audit-operasional-untuk-menila.pdf> di akses tanggal: 10 Februari 2020

<https://www.jurnal.id/id/blog/6-langkah-melakukan-proses-audit-ini/> di akses tanggal:
11 Februari 2020

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara:

Narasumber: Romie syahril, SE, Ak

1. Bagaimana gambaran audit operasional di BPRS Carana Kiat Andalas
2. Bagaimana prosedur audit operasional pembiayaan di BPRS Carana kiat Andalas?
3. Apa saja yang termasuk dalam proses Audit operasional?
4. Siapa pihak eksternal dan Internal yang melaksanakan audit operasional
5. Bagaimana peranan *Internal Control* dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pembiayaan?
6. Bagaimana posisi *Internal Control* dalam menjalankan tugasnya dan apakah termasuk bagian dari struktur organisasi perusahaan?
7. Apa dan siapa saja yang menjadi objek pemeriksaan terhadap administrasi pembiayaan?
8. Bagaimana prosedur pembiayaan kepada nasabah di BPRS Carana Kiat Andalas?
9. Bagaimana analisa pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalas?
10. Apa strategi yang dilakukan oleh analis dan marketing supaya pembiayaan yang diberikan berjalan dengan lancar?
11. Apa saja permasalahan yang sering muncul dalam pemberian pembiayaan
12. Apa risiko yang timbul jika terjadi pembiayaan yang bermasalah
13. Apa langkah yang diambil untuk mengurangi risiko pada pembiayaan yang sewaktu waktu bisa terjadi?

14. Jika kesalahan pada pembiayaan bersumber dari pegawai BPRS Carana Kiat Andalas, apa sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan?
15. Siapa saja yang menjadi petugas audit di BPRS Carana Kiat Andalas
16. Kapan audit operasional di lakukan?

